

Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo

Evaluation of Land Suitability for Settlement in Palopo City

Gabriela I. Sarira^a, Windy Mononimbar^b, Frits O.P. Siregar^c

^aProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^bProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^cProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
gabrielairene.s@gmail.com

Abstrak

Seiring berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk terus meningkat, mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan data BPS Kota Palopo terjadi pertambahan penduduk sebanyak 34.628 jiwa pada tahun 2012-2021. Selain itu berdasarkan RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041, Kota Palopo merupakan kawasan strategis kota. Kota Palopo juga merupakan salah satu daerah yang ikut mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dimana semakin bertambahnya kawasan permukiman yang tidak sejalan dengan yang seharusnya. Pembangunan permukiman di lahan tidak tepat dengan peruntukannya atau yang tidak direncanakan dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memahami kesesuaian lahan di Kota Palopo dan melakukan evaluasi kesesuaian lahan permukiman terhadap rencana pola ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022- 2041. Teknik overlay (tumpang susun) atau menindihkan berbagai parameter kesesuaian lahan yang ada serta analisis skoring untuk memberikan nilai pada sifat parameter yang digunakan dalam analisis data. Berdasarkan hasil analisis terdapat lima kelas kesesuaian lahan yakni: kawasan lindung, kawasan perkebunan terbatas/resapan air, kawasan perkebunan, kawasan perkebunan/permukiman terbatas, dan kawasan permukiman. Selain itu hasil evaluasi kesesuaian lahan permukiman terhadap rencana pola ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 yang dominan ialah tingkat Sangat Sesuai dengan luas sebesar 2.528,74 Ha.

Kata kunci: Evaluasi; Kesesuaian Lahan; Permukiman.

Abstract

Over time, the population continues to increase, resulting in changes in land use. Based on BPS data for Palopo City, there was a population increase of 34,628 people in 2012-2021. In addition, based on the 2022-2041 Palopo City Spatial Planning, Palopo City is a strategic city area. The city of Palopo is also one of the areas that has experienced the conversion of agricultural land into residential areas where there is an increasing number of residential areas that are not in line with what they should be. Settlement development on land that is not in accordance with its designation or that is not planned can have an impact on reducing environmental quality. This research was made with the aim of understanding land suitability in Palopo City and evaluating the suitability of residential land against the spatial pattern plan of the Palopo City Spatial Plan for 2022-2041. The overlay technique (overlapping) or overlapping various existing land suitability parameters as well as scoring analysis to assign values to the properties of the parameters used in data analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that there are five land suitability classes: protected areas, limited plantation areas/water absorption, plantation areas, limited plantation/settlement areas, and residential areas. In addition, the results of the evaluation of the suitability of residential land for the 2022-2041 spatial pattern plan for Palopo City, which is dominant, is the Very Suitable level with an area of 2,528.74 Ha.

Keyword: Evaluation; Land Suitability; Settlement.

1. Pendahuluan

Dengan pertambahan populasi, penggunaan lahan juga mengalami pertumbuhan yang berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Menurut RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041, Kota Palopo dianggap sebagai kawasan strategis dengan berbagai fungsi, seperti pusat pelayanan pemerintah, perdagangan, jasa skala regional, serta pariwisata. Hal ini menjadikan tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi karena lokasinya yang strategis.

Penentuan tempat pemukiman yang benar memiliki peranan krusial dalam faktor spasial, dikarenakan hal tersebut berpengaruh pada ketahanan dan daya tahan hunian, harga, serta akibat dari pemukiman tersebut pada lingkungan disekelilingnya (Sutikno, 1982). Di Kota Palopo lahan pertanian juga telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, namun beberapa kawasan permukiman tidak sesuai dengan peruntukannya. Perubahan penggunaan lahan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan antara kondisi lahan dan penggunaannya, sehingga tidak selaras antara lingkungan alam dan keperluan masyarakat terhadap lahan tempat tinggal.

Pembangunan pemukiman pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak direncanakan dapat berakibat buruk pada lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, evaluasi kesesuaian lahan permukiman di Kota Palopo terhadap rencana pola ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan dan kualitas pemukiman.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis secara spasial menggunakan SIG atau sistem informasi geografis. Penilaian kemampuan dan kesesuaian lahan pemukiman berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007. Faktor-faktor yang dievaluasi dalam analisis kemampuan lahan mencakup SKL morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, pembuangan limbah, erosi, serta risiko bencana alam.

Terdapat 7 tahapan analisis untuk bisa memperoleh kesesuaian lahan yaitu petunjuk tata ruang untuk sektor pertanian, petunjuk rasio tutupan lahan, petunjuk ketinggian bangunan, petunjuk penggunaan air baku, perkiraan kapasitas lahan, persyaratan dan batasan pengembangan, serta evaluasi penggunaan lahan yang ada dengan kesesuaian lahan. Dalam mengevaluasi kesesuaian lahan permukiman adapun parameter yang digunakan yaitu peruntukan lahan permukiman berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 dan hasil analisis kesesuaian lahan.

3. Kajian literatur

Menurut Malingreau (1981) penggunaan lahan adalah hasil intervensi manusia yang dilakukan secara tetap maupun berkala terhadap lahan yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan material, kebutuhan religius atau kombinasi keduanya.

Arsyad (2010) yang dikutip dalam Hadi (2015) menjelaskan bahwa kemampuan lahan adalah evaluasi tentang kapasitas lahan untuk tujuan tertentu, dan penilaiannya didasarkan pada faktor-faktor yang membatasi. Jika kapasitas lahan tidak sejalan dengan kemampuannya dan tidak dipelihara sebagaimana mestinya, akan terjadi erosi yang mengurangi daya guna lahan. Sumbangan Baja (2012) juga menyatakan bahwa metode klasifikasi kemampuan lahan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi tentang kemampuan fisik lahan untuk berbagai penggunaan. Klasifikasi kemampuan lahan dilakukan berdasarkan faktor pembatas yang mempengaruhi kemampuan lahan. Faktor pembatas merupakan karakteristik lahan yang berdampak negatif terhadap kapasitas lahan.

Menurut Parwata (2004) permukiman ialah suatu tempat tinggal atau bermukim manusia yang dipersiapkan secara matang serta memiliki tujuan yang jelas, sehingga dapat memberi rasa nyaman bagi penghuninya. Dalam PERMEN PU Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya bahwa kriteria lokasi dan kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman yaitu: kelerengan lahan 0 sampai 25%, terdapat sumber air, tidak terletak di lokasi rawan bencana, keadaan drainase termasuk baik hingga sedang, menghindari kawasan sempadan, menghindari atau menjauhi kawasan lindung, tidak bertempat di kawasan budidaya perikanan dan pertanian atau penyangga, serta menjauhi sawah irigasi.

Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) menjelaskan bahwa kesesuaian lahan mengacu pada sejauh mana suatu lahan cocok untuk penggunaan tertentu. Klasifikasi kesesuaian lahan, menurut dengan FAO (1976) dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), melibatkan pencocokan dari kualitas lahan dan syarat penempatan lahan yang dikehendaki.

Menurut Anne Anastasia (1978) evaluasi ialah suatu proses yang tersusun secara sistematis untuk melihat sejauh mana sebuah tujuan telah dicapai. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai sebuah penilaian terhadap sesuatu secara sistematis, terencana, dan juga terarah serta memiliki tujuan yang jelas sebagai dasarnya. Studi ini terkait mengevaluasi kesesuaian lahan permukiman berdasarkan arahan kesesuaian lahannya. Dikutip dalam Alex Manoi, Windy Mononimbar, dan Roosje Poluan (2022) bahwa kelas kesesuaian lahan permukiman mempunyai karakteristik, potensi dan faktor kendala atau penghambat seperti: Kelas S1 atau "Sangat Sesuai" termasuk dalam kategori pengembangan/pengelolaan lahan yang sangat tinggi serta tergolong arahan kawasan permukiman, tidak mempunyai faktor kendala sehingga terdapat potensi yang sangat tinggi untuk pengembangan permukiman. Kelas S2 atau "Cukup Sesuai" memiliki faktor kendala namun tetap menawarkan potensi untuk pengembangan kawasan permukiman, karena tergolong memiliki potensi pengembangan lahan yang relatif tinggi namun orientasinya cukup terbatas. Pada kategori S3 atau "Sesuai" memiliki unsur kendala yang berat, memiliki potensi untuk pengembangan yang tergolong menengah untuk kawasan permukiman, untuk potensi pengembangan lahan tergolong sedang serta orientasinya juga cukup terbatas. Pada kelas N1 atau "Tidak Sesuai" terdapat faktor kendala yang tergolong agak berat namun dapat diatasi, potensi untuk dikembangkan kawasan permukiman tergolong rendah. Kelas N2 atau "Sangat Tidak Sesuai" terdapat faktor penghambat sangat berat, potensi pengelolaan tergolong sangat rendah untuk kawasan permukiman dan merupakan kawasan lindung. Faktor kendala atau penghambat ini ditinjau melalui kondisi fisik, kemampuan dan kesesuaian lahan yang dimiliki.

4. Hasil dan Pembahasan

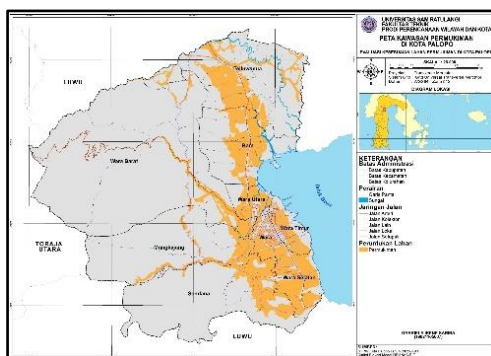
4.1 Kondisi Kawasan Permukiman Kota Palopo

Berdasarkan RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 bahwa kawasan peruntukan permukiman memiliki luas kurang lebih 5.349 Ha yang tersebar di 9 kecamatan. Adapun perkembangan kawasan permukiman pada setiap kecamatan di wilayah lokasi studi memiliki penyebab atau latar belakang yang berbeda-beda, dan mendapat pengaruh oleh jenis-jenis pemanfaatan lahan serta aktivitas wilayah tersebut. Berikut ini adalah tabel luas lahan permukiman di Kota Palopo.

Tabel 1 Luas Lahan Lahan Permukiman Kota Palopo (Dinas PUPR Kota Palopo, 2023)

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Wara Selatan	839,9
2	Sendana	755,77
3	Wara	308,5
4	Wara Timur	320,46
5	Mungkajang	422,42
6	Wara Utara	312,63
7	Bara	864,59
8	Telluwanua	1072,99
9	Wara Barat	457,94
Total		5.355,2

Berikut ini merupakan peta kawasan permukiman di Kota Palopo.



Gambar 1. Peta Kawasan Permukiman Kota Palopo (Dinas PUPR Kota Palopo, 2023)

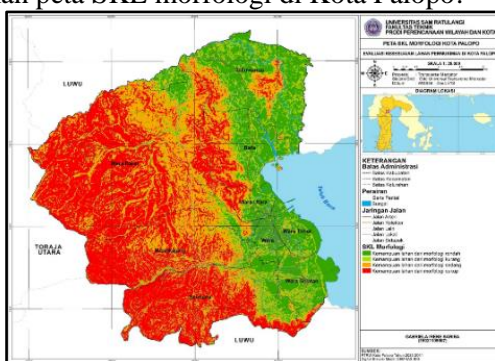
4.2 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

SKL morfologi di Kota Palopo dominan oleh morfologi yang tergolong pada bagian cukup dengan luas 10.497,45 Ha atau 38%, sedangkan SKL morfologi yang tidak mendominasi adalah morfologi kurang seluas 2.725,21 Ha atau 10% dari keseluruhan total area terkait. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2 SKL Morfologi Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL MORFOLOGI	Luas (Ha)	Persentase (%)
Morfologi Rendah	6321,27	23
Morfologi Kurang	2725,21	10
Morfologi Sedang	7808,43	29
Morfologi Cukup	10497,45	38
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL morfologi di Kota Palopo.



Gambar 2. Peta SKL Morfologi Kota Palopo (Dinas PUPR Kota Palopo, 2023)

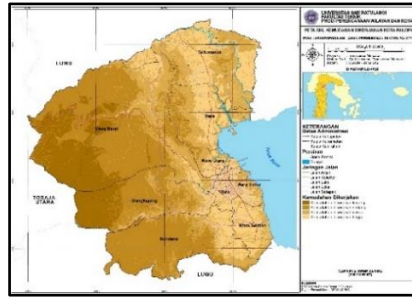
4.3 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

Kelas kemudahan dikerjakan dengan kategori sedang memiliki cakupan paling luas yakni 10.055,97 Ha atau 37% dari keseluruhan wilayah, dan kelas kemudahan dikerjakan kurang memiliki wilayah cakupan paling kecil yakni 3.652,34 Ha atau 13% dari keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3 SKL Kemudahan Dikerjakan Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL KEMUDAHAN DIKERJAKAN	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kurang	3652,34	13
Sedang	10055,97	37
Cukup	7331,48	27
Tinggi	6312,57	23
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL kemudahan dikerjakan di Kota Palopo.



Gambar 3. Peta SKL Kemudahan Dikerjakan Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

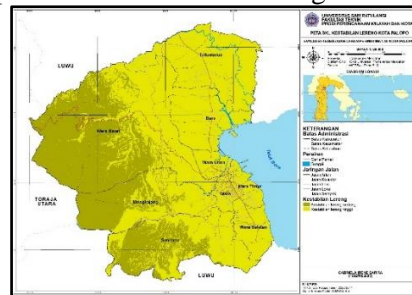
4.4 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

SKL kestabilan lereng di Kota Palopo menghasilkan dua kategori yaitu kestabilan lereng tinggi dengan cakupan paling luas sebesar 17825,8 Ha atau 65% dari total luas wilayah, dan kestabilan lereng sedang dengan cakupan paling rendah sebesar 9526,56 Ha atau 35% dari keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4 SKL Kestabilan Lereng Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL KESTABILAN LERENG	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sedang	9526,56	35
Tinggi	17825,8	65
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL kestabilan lereng di Kota Palopo.



Gambar 4. Peta SKL Kestabilan Lereng Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

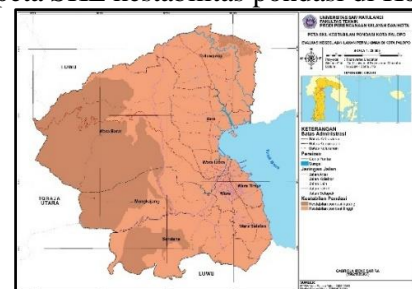
4.5 Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi

SKL kestabilan pondasi di Kota Palopo menghasilkan dua kategori kestabilan pondasi yaitu kestabilan pondasi tinggi dengan cakupan paling luas sebesar 17390,95 Ha atau 64% dari keseluruhan wilayah atau area, serta stabilitas pondasi kategori kurang dengan cakupan luas paling rendah sebesar 9961,41 Ha atau 36% dari jumlah keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 5 SKL Kestabilan Pondasi Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL KESTABILAN PONDASI	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kurang	9961,41	36
Tinggi	17390,95	64
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL kestabilan pondasi di Kota Palopo.



Gambar 5. Peta SKL Kestabilan Pondasi Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

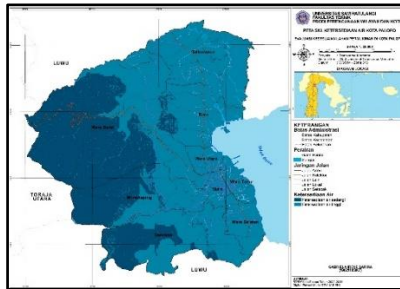
4.6 Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

SKL ketersediaan air di Kota Palopo menghasilkan dua kategori yaitu ketersediaan air tinggi dengan cakupan paling luas sebesar 17169,03 Ha atau 63 persen dari keseluruhan area, serta ketersediaan air sedang dengan cakupan paling rendah sebesar 10183,33 Ha atau 37 persen dari keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 6 SKL Ketersediaan Air Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL KETERSEDIAAN AIR	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sedang	10183,33	37
Tinggi	17169,03	63
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL ketersediaan air di Kota Palopo.



Gambar 6. Peta SKL Ketersediaan Air Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

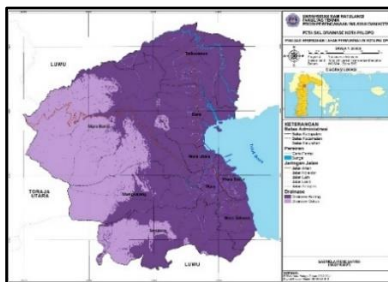
4.7 Satuan Kemampuan Lahan untuk Drainase

SKL untuk drainase di Kota Palopo menghasilkan dua kategori yaitu drainase kurang dengan cakupan paling luas sebesar 17827,16 Ha atau 65% dari keseluruhan wilayah, dan drainase cukup dengan cakupan paling rendah sebesar 9525,2 Ha atau 35 persen dari keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 7 SKL untuk Drainase Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL UNTUK DRAINASE	Luas (Ha)	Persentase (%)
Drainase cukup	9525,2	35
Drainase kurang	17827,16	65
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL untuk drainase di Kota Palopo.



Gambar 7. Peta SKL untuk Drainase Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

4.8 Satuan Kemampuan Lahan terhadap Erosi

Kelas erosi sangat rendah dengan cakupan paling luas sebesar 12354,48 Ha atau 45% dari keseluruhan wilayah, dan tidak ada erosi dengan cakupan paling rendah sebesar 4844,78 Ha atau 18 persen dari keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 8 SKL terhadap Erosi Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL TERHADAP EROSI	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat rendah	12354,48	45
Sedang	10153,1	37
Tidak ada erosi	4844,78	18

Total	27352,36	100
--------------	-----------------	------------

Berikut ini merupakan peta SKL terhadap erosi di Kota Palopo.



Gambar 8. Peta SKL terhadap Erosi Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

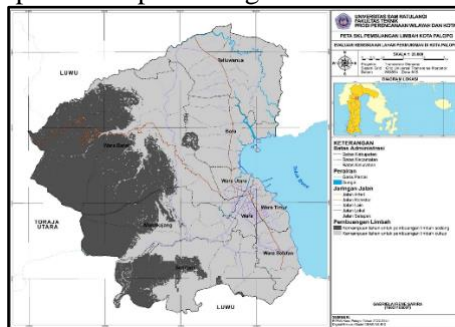
4.9 Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah

SKL pembuangan limbah di Kota Palopo menghasilkan dua kriteria yaitu kapasitas lahan untuk mengolah sampah cukup dengan cakupan paling luas sebesar 17827,16 Ha atau 65% dari keseluruhan wilayah tersebut, dan kapasitas lahan untuk membuang sampah sedang dengan cakupan paling rendah sebesar 9525,2 Ha atau 35 persen dari keseluruhan wilayah tersebut. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 9 SKL Pembuangan Limbah Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL PEMBUANGAN LIMBAH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Cukup	17827,16	65
Sedang	9525,2	35
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL pembuangan limbah di Kota Palopo.



Gambar 9. Peta SKL Pembuangan Limbah Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

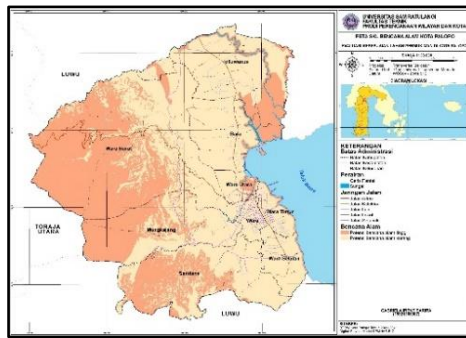
4.10 Satuan Kemampuan Lahan terhadap Bencana Alam

SKL terhadap bencana alam di Kota Palopo menghasilkan dua kriteria yaitu potensi bencana alam kurang dengan cakupan paling luas sebesar 15987,68 Ha atau 58% dari total luas wilayah, dan potensi bencana alam tinggi dengan cakupan paling rendah sebesar 11364,68 Ha atau 42% dari total luas wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 10 SKL terhadap Bencana Alam Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

SKL BENCANA ALAM	Luas (Ha)	Persentase (%)
Potensi bencana alam kurang	15987,68	58
Potensi bencana alam tinggi	11364,68	42
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta SKL terhadap bencana di Kota Palopo.



Gambar 10. Peta SKL terhadap Bencana Alam Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

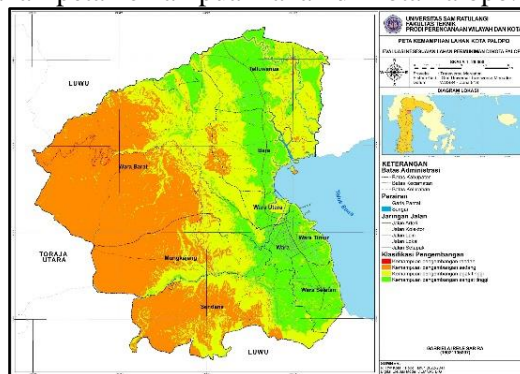
4.11 Kemampuan Lahan

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan visualisasi tingkat kapasitas lahan untuk berkembang, sebagai acuan terhadap arah keselarasan lahan di tahap analisis berikutnya. Kemampuan pengembangan yang mendominasi di Kota Palopo yaitu kemampuan pengembangan sedang sebesar 11.090,4 Ha atau 41 % dari total keseluruhan wilayah, dan kemampuan pengembangan terkecil yaitu kemampuan pengembangan rendah sebesar 20,88 Ha atau 0 persen dari keseluruhan wilayah. Klasifikasi kemampuan lahan ini kemudian dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan kawasan terbangun. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 11 Kemampuan Lahan Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

KELAS	KLASIFIKASI PENGEMBANGAN	Luas (Ha)
A	Kemampuan pengembangan sangat rendah	-
B	Kemampuan pengembangan rendah	20,88
C	Kemampuan pengembangan sedang	11090,4
D	Kemampuan pengembangan agak tinggi	9881,49
E	Kemampuan pengembangan sangat tinggi	6359,59
Total	27352,36	100

Berikut ini merupakan peta kemampuan lahan di Kota Palopo.



Gambar 11. Peta Kemampuan Lahan Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

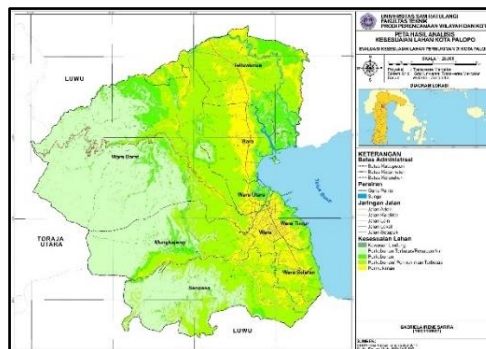
4.12 Analisis Kesesuaian Lahan

Berdasarkan hasil analisis terdapat 5 kelas kesesuaian lahan yaitu: kawasan lindung, perkebunan terbatas atau resapan air, perkebunan, perkebunan atau permukiman terbatas, dan permukiman. Kelas yang mendominasi yaitu kelas kawasan perkebunan terbatas atau resapan air sebesar 10949,96 Ha atau 40% dari keseluruhan wilayah, sedangkan kelas dengan cakupan terkecil yaitu kawasan lindung sebesar 74,6 Ha atau 0,27% dari keseluruhan wilayah. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 12 Hasil Analisis Kesesuaian Lahan Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

Kecamatan	Luas Klasifikasi Kesesuaian Lahan (Ha)				
	Kawasan Lindung	Perkebunan Terbatas/ Resapan Air	Perkebunan	Perkebunan/ Permukiman Terbatas	Permukiman
Bara	0,36	153,52	363,48	1091,79	687,96
Mungkajang	4,2	1990,69	300,12	1188,54	194,26
Sendana	2,9	2052,83	160,15	1892	323,35
Telluwana	1,37	148,64	741,33	2140,34	989,19
Wara	-	-	2,11	54,22	386,24
Wara Barat	65,76	6565,49	1038,74	2184,52	369,2
Wara Selatan	-	7,23	58,58	589,26	449,81
Wara Timur	0,01	9,74	105,79	175,57	318,22
Wara Utara	-	21,82	74,19	262	186,84
Total	74,6	10949,96	2844,49	9578,24	3905,07
Persentase (%)	0,27	40,03	10,40	35,02	14,28

Peluang kemampuan pengembangan kawasan permukiman, khususnya pada kategori kawasan permukiman dan kawasan perkebunan/permukiman terbatas. Adapun peta hasil analisis kesesuaian lahan disajikan melalui gambar di bawah ini.

**Gambar 12.** Peta Hasil Analisis Kesesuaian Lahan Kota Palopo (Hasil Analisis, 2023)

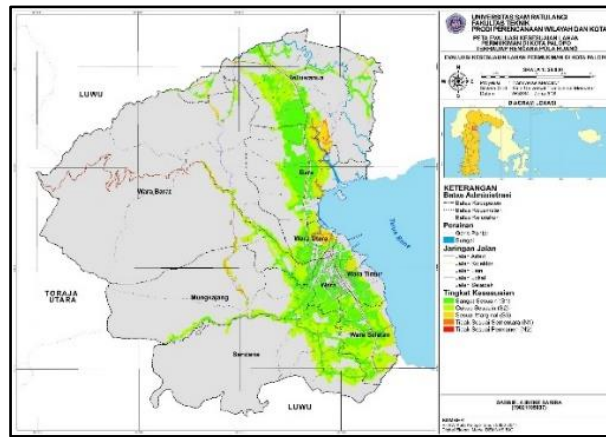
4.13 Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041

Evaluasi ini menggunakan dua arahan sebagai kriteria kesesuaian lahan permukiman yakni arahan kemampuan lahan untuk melihat kemampuan pengembangan lahan, dan kesesuaian peruntukan lahan. Berdasarkan hasil analisis ada 5 kategori kesesuaian lahan yakni: sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai, tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai permanen. Adapun kelas yang mendominasi adalah kelas sangat sesuai dengan luas sebesar 2.528,74 Ha atau 47,22% dari keseluruhan lahan permukiman, sedangkan kelas dengan cakupan terkecil yaitu tidak sesuai permanen dengan 0,77 Ha atau 0,01% dari keseluruhan lahan permukiman. Adapun hasil analisis ini disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 13 Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 (Hasil Analisis, 2023)

Kecamatan	Kriteria					Total	Keterangan
	Tidak Sesuai Permanen (N2)	Tidak Sesuai Saat Ini (N1)	Sesuai (S3)	Cukup Sesuai (S2)	Sangat Sesuai (S1)		
Bara	-	20,94	71,27	263,73	508,65	864,59	Sangat Sesuai (S1) Klasifikasi pengembangan lahan sangat tinggi, sehingga masih sangat potensial untuk dikembangkan permukiman.
Mungkajang	0,54	8,29	16,58	226,2	170,81	422,42	Cukup Sesuai (S2) Klasifikasi kemampuan pengembangan lahan agak tinggi, namun masih ada potensi yang tinggi untuk pengembangan permukiman.
Sendana	-	-	6,89	509,03	239,85	755,77	Sesuai (S3) Klasifikasi kemampuan pengembangan lahan sedang, sehingga kemungkinan pengembangan kawasan pemukiman tergolong menengah.
Telluwanua	-	24,7	97,37	455,88	495,04	1072,99	Tidak Sesuai (N1) Klasifikasi kemampuan pengembangan lahan rendah, sehingga potensi pengembangan kawasan permukiman tergolong kurang.
Wara	-	-	-	44,48	264,02	308,5	Tidak Sesuai Permanen (N2) Klasifikasi kapasitas pengolahan lahan cenderung minim dan arahan area lindung, mempunyai prasyarat untuk mengembangkan yang sangat berat.
Wara Barat	0,23	10,84	13,59	297,85	135,43	457,94	
Wara Selatan	-	0,46	27,23	453,78	358,43	839,9	
Wara Timur	-	0,05	25,2	66,6	228,61	320,46	
Wara Utara	-	16,62	59,23	108,88	127,9	312,63	
Total	0,77	81,9	317,36	2426,43	2528,74	5355,2	
Persentase (%)	0,01	1,53	5,93	45,31	47,22	100	

Adapun peta evaluasi kesesuaian lahan permukiman di Kota Palopo terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 dapat dilihat berikut ini.



Gambar 13. Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 (Hasil Analisis, 2023)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat lima kelas kesesuaian lahan yakni: kawasan lindung, kawasan perkebunan terbatas atau resapan air, kawasan perkebunan, kawasan perkebunan atau permukiman terbatas, dan kawasan permukiman. Sedangkan hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041 terdapat 5 kategori yaitu: sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai, tidak sesuai dan tidak sesuai permanen. Kategori sangat sesuai merupakan kategori yang mendominasi di Kota Palopo, yang mencakup luas sekitar 2528,74 Ha atau sekitar 47,22% dari luas lahan permukiman. Lahan pada kategori ini mempunyai potensi pembangunan atau pengembangan yang besar serta tergolong dalam arahan kawasan permukiman. Hal ini dikarenakan kawasan ini dinilai paling sesuai ditinjau berdasarkan karakteristik fisik lahannya, kemampuan lahan dan kesesuaian lahannya.

Referensi

- Anonim. (2007). Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007.
- Anonim. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.
- Anonim. (2022). RTRW Kota Palopo Tahun 2022 -2041
- Anastasi, Anne. Psychological Testing. New York: Macmillan, Co, Inc. 1978. Peter L Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo. (2022). Kota Palopo Dalam Angka.
- Baja, I. S. (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hadi, R. (2015). *Analisis Kemampuan Lahan Untuk Pengembangan Permukiman Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. (2007). *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mallingreau and Rosalia, 1981. Land use/Land Cover Classification in Indonesia, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
- Manoi, A. A. W., Mononimbar, W., & Poluan, R. J. (2022). *Evaluation Of Land Suitability For Settlement Area In North Minahasa Regency (Research Location: District Of Kalawat, Airmadidi, Kauditan And Kema) Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus: Kecamatan Kalawat, Airmadidi, Kauditan Dan Kema)*. SPASIAL, 9(1), 1-12.
- Parwata, (2004). *Elemen Permukiman*. University Press